

**PENINGKATAN KUALITAS FORMAT PELAPORAN UNTUK  
PENINGKATAN KINERJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SINJAI**

***IMPROVING THE QUALITY OF REPORTING FORMATS FOR INCREASING  
THE PERFORMANCE OF COMMUNITY PROTECTION OF PUBLIC PRIVATE  
POLICE UNITS AND FIRE FIGHTING IN SINJAI REGENCY***

**Madjdah Mulia  
Asmin<sup>1</sup>**

Dinas Satuan Polisi  
Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Sinjai,  
Indonesia<sup>1</sup>

email:

[muliaasmin@gmail.com](mailto:muliaasmin@gmail.com)

**Muhammad**

**Irsyad Sayuti<sup>2</sup>**

PPSDM Kemendagri  
Regional Makassar,  
Indonesia<sup>2</sup>

email:

[irsyadxix@gmail.com](mailto:irsyadxix@gmail.com)

**Abstrak:** Analisis Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu jabatan yang ada di lingkup Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Analisis perlindungan masyarakat merupakan bagian dari seksi perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketenteraman. Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, seksi perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya menemukan kendala karena belum optimalnya pelaporan hasil kegiatan data perlindungan masyarakat. Tujuan adanya penulisan ini yaitu untuk melihat peran perbaikan format pelaporan untuk peningkatan kinerja perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap perbaikan format pelaporan ini, penulis menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan pemilihan responden beberapa pegawai bidang ketertiban umum dan ketenteraman Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kesimpulan dari kuesioner yang dibagikan kepada responden ditemukan yaitu responden menyetujui perbaikan format pelaporan mengikuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2010, memahami format perbaikan pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketenteraman, informasi menjadi lebih jelas dan detail, dilakukan secara continue dan konsisten, serta perbaikan format pelaporan memberikan manfaat buat kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai.

**Kata Kunci:** Format Pelaporan, Peningkatan Kinerja, Perlindungan Masyarakat.

**Abstract:** Community Protection Analyst is one of the positions within the scope of the Civil Service Police Unit and Fire Department of Sinjai Regency. The public protection analyst is part of the public protection section in the field of public order and peace. Based on Sinjai Regent Regulation Number 61 of 2016 concerning organizational structure, position, main tasks and functions and work procedures of civil service police units and firefighters, the community protection section is led by a section head who has the main task of assisting the Head of Public Order and Peace in carrying out drafting material for reviewing technical policies as well as the implementation of operational and administrative

JGPI

p-ISSN: 2774-907X

e-ISSN: 2775-0140

Vol. 3, No. 1, pp. 44-57

April, 2023

Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

*tasks in the field of community protection. However, in carrying out their duties, they encountered obstacles due to the not yet optimal reporting of the results of community protection data activities. the purpose of this writing is to see the role of improving the reporting format for increasing the performance of public protection of civil service police units and firefighters in Sinjai Regency. To find out the responses of respondents to the improvement of this reporting format, the authors used a descriptive analysis method with a quantitative approach by selecting several respondents from the public order and security department of the Public Service Police Unit and the Fire Department. The conclusion from the questionnaire distributed to the respondents was found that the respondents agreed to improve the reporting format following Permendagri Number 27 of 2010, understand the format for improving reporting on public protection in the field of public order and peace, information becomes clearer and more detailed, carried out continuously and consistently, as well as improvements to the reporting format provide benefits for the performance of the Civil Service Police Unit Office of Sinjai Regency*

**Keywords:** *Reporting Format, Performance Improvement, Community Protection.*

## PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Hasrul, 2017; Suhendi, 2019).

Analisis perlindungan masyarakat adalah salah satu jabatan yang berada di ruang lingkup Instansi unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Jabatan ini berada pada Seksi perlindungan masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis, dimana membuat Pemerintah Daerah dan masyarakat mampu untuk melakukan kegiatan ketentraman, melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, teratur (Sutrisno et al, 2016; Nugroho & Supardal, 2022)

Sedangkan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari bidang ketertiban umum dan ketentraman memiliki peran yang dianggap strategis dalam rangka melaksanakan keamanan, ketertiban lingkungan dan upaya pengurangan dan penanggulangan bencana alam maupun sosial. Maka dalam hal tugas tersebut, fungsi perlindungan masyarakat yang secara detail yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu dalam penyelenggaraan pertahanan Negara (Murtinisngsih, 2012; Kinasih & Pramono, 2018; Astuti, 2020).

Kepala kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat mengungkapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. (Gunawan, 2015; Bima, 2021). Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sinjai yang teratur sesuai dengan norma, bebas dari ancaman dan gangguan serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketentraman, ketertiban dan kegiatan sosial kemasyarakatan, diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2015 disebutkan bahwa Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, dan Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat. tugas ini berdasar dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016. Namun salah satu kendala dalam menjalankan tugas tersebut yaitu karena belum optimalnya pelaporan hasil kegiatan data perlindungan masyarakat. belum optimalnya ini tentu akan mempengaruhi suatu kinerja dalam organisasi.

Kinerja disini yaitu berarti gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dalam sasaran tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi organisasi (Yulia, 2019; Handayani, 2020; Syamsuddin, 2020). Maka tentunya dari kendala yang disebutkan diatas menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis selaku analis perlindungan masyarakat yang memiliki tugas yaitu menganalisis data dan bahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat harus mempunyai peran mengatasi dan membuat suatu gagasan kreatif yaitu “Perbaikan Format Pelaporan Untuk Peningkatan Kinerja Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai” sehingga dengan adanya perbaikan format tersebut dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan detail mengenai bidang ketertiban umum dan ketentraman khususnya perlindungan masyarakat kabupaten Sinjai.

## **METODE**

Teknik pengumpulan data dengan pembagian kuesioner. Sedangkan untuk dapat mengukur keberhasilan dari kegiatan yang dibuat, maka penulis menggunakan jenis kajian kuantitatif dengan pendekatan metode analisis yaitu statistik deskriptif. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai di unit Instansi penempatan kerja penulis. Teknik pemilihan sampel yang dipilih yaitu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (purposive sampling). Menurut sugiyono (2018) purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Tujuan penggunaan teknik sampel ini yaitu untuk mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara khusus oleh peneliti. Maka, sampel yang dipilih oleh penulis yaitu beberapa pegawai bidang ketertiban umum dan ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Terutama yang menjadi Kepala Unit di Kecamatan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Pelaksanaan pengkajian format laporan perlindungan masyarakat**

Pada pelaksanaan pengkajian format laporan perlindungan masyarakat peneliti mempelajari beberapa referensi yaitu Permendagri nomor 27 tahun 2010 tentang

pedoman pelaporan satuan polisi pamong praja, Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan laporan perlindungan masyarakat tahun 2022 Kabupaten Sinjai. Pada kegiatan pelaksanaan pengkajian format laporan perlindungan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu, pengumpulan materi format laporan, pembuatan lembar format laporan perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan validasi format laporan oleh seksi perlindungan masyarakat. Tahapan pertama yaitu pengumpulan materi format laporan perlindungan masyarakat, Pada tahapan ini peneliti menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabel, dengan panduan perilaku yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Mencari literatur ataupun materi sebagai acuan pembuatan format laporan dengan cermat merupakan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Selain itu surat persetujuan melakukan kegiatan penelitian yang sebelumnya dilakukan sebelum melakukan kegiatan pertama ditanda tangani oleh Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menerapkan nilai dasar ASN yaitu kolaboratif dengan panduan perilaku yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tahapan kedua yaitu pembuatan lembar format laporan perlindungan masyarakat. Selain itu bentuk diskusi dengan sesama staf seksi perlindungan masyarakat yang telah dilakukan juga menerapkan nilai dasar ASN yaitu Kolaboratif, dengan panduan perilaku terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dimana peneliti akan menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Tahapan ketiga yaitu validasi format laporan oleh seksi perlindungan masyarakat. pada tahapan ini, peneliti menerapkan nilai dasar ASN yaitu Adaptif. Panduan perilaku nilai adaptif yang peneliti terapkan yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dimana dalam validasi format laporan oleh seksi perlindungan masyarakat diharapkan inovasi yang dibuat ini akan mendukung tujuan instansi secara konsisten dan juga untuk kemajuan instansi kedepannya.

## **2. Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur)**

Pada pembuatan SOP disini peneliti membuat susunan kerja seksi perlindungan masyarakat yang dilengkapi oleh beberapa simbol dalam flow chart yang selanjutnya akan di tanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku kepala dinas. Pada kegiatan pembuatan SOP terdiri dari tiga tahapan yaitu, pembuatan susunan kerja oleh seksi perlindungan masyarakat, perencanaan alur proses, dan persetujuan oleh Kepala Dinas. Tahapan pertama yaitu pembuatan susunan kerja oleh

seksi perlindungan masyarakat. Nilai dasar ASN yang diterapkan dalam tahapan ini yaitu Kolaboratif dengan panduan perilaku yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan menerima pendapat dan saran dengan sesama staf dalam menyelesaikan pekerjaan, tahapan ini menjadi lebih mudah untuk diselesaikan selain itu komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja membuat sumber daya menjadi lebih optimal dan diharapkan pencapaian kinerja instansi menjadi lebih baik. Tahapan kedua yaitu perencanaan alur proses. Dalam perencanaan alur proses, peneliti menerapkan nilai dasar ASN yaitu Akuntabel. Panduan perilaku nilai Akuntabel yang peneliti terapkan yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dalam tahapan ini peneliti melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) dapat berjalan semestinya. Dalam tahapan ini peneliti juga bertanggung jawab atas hasil kerja yang telah peneliti kerjakan dan bersedia di evaluasi oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat selaku mentor jika memang terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Tahapan ketiga yaitu persetujuan oleh Kepala Dinas. Dalam tahapan ini, peneliti menerapkan nilai dasar ASN yaitu Kolaboratif. Panduan perilaku nilai kolaboratif yang peneliti terapkan yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dimana dalam tahapan persetujuan oleh Kepala Dinas ini, berarti peneliti sedang bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan pekerjaan dan mendorong rekan kerja utamanya pimpinan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **3. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi kepada aparat**

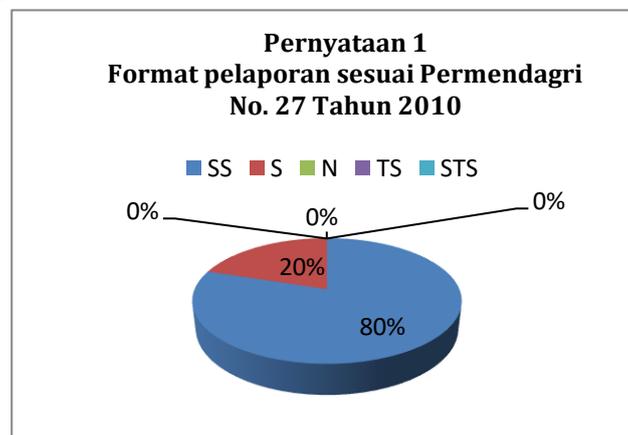
Pada kegiatan ini, pelaksanaan sosialisasi dan simulasi kepada aparat dilaksanakan selama 8 hari yang didalamnya terdapat persiapan, pelaksanaan, pendistribusian, hingga penyusunan perbaikan format pelaporan. Kegiatan sosialisasi dan simulasi kepada aparat ini terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan pelaksanaan sosialisasi dan simulasi, pendistribusian format laporan, penyusunan laporan sesuai dengan format yang telah dibuat oleh seksi perlindungan masyarakat. Tahapan pertama yaitu persiapan pelaksanaan sosialisasi dan simulasi. Membuat undangan sebelum persiapan sosialisasi dan simulasi merupakan bentuk pelayanan terhadap sesama staf dengan memberikan pemberitahuan secara resmi sebelum acara dilaksanakan. Dengan membuat undangan yang resmi juga bentuk ramah terhadap sesama rekan kerja, dan hingga pelaksanaan sosialisasi dan simulasi merupakan bentuk solutif terhadap masalah pelaporan yang

dialami, menjawab beberapa pertanyaan saat sosialisasi dan dapat diandalkan dalam menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Saat terlaksananya sosialisasi peneliti berusaha membagikan pengetahuan yang peneliti ketahui terkait pelaporan perlindungan masyarakat sesuai acuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2010, berdialog dengan sesama rekan maupun atasan demi peningkatan kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Tahapan kedua yaitu pendistribusian format laporan. Dalam tahapan ini sebisa mungkin format laporan yang dibuat bisa didapat melalui link, agar lebih efektif dan efisien membantu orang lain memperoleh format laporan perlindungan masyarakat. Dalam tahapan ini dengan nilai harmonis peneliti berusaha membantu rekan kerja dari Kecamatan ataupun pos lain yang berada diluar Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai dengan lebih responsif, berusaha menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dan memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan. Selain itu nilai dasar ASN Adaptif juga diterapkan dalam tahap ini, dengan panduan perilaku yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dimana dalam tahapan pendistribusian format laporan, selain pada saat sosialisasi juga diperlihatkan perbaikan format pelaporan satuan polisi pamong praja dalam layar LCD dan dalam bentuk lembaran, juga dengan membagikan link laporan. Ini menunjukkan kita menyesuaikan diri dengan menggunakan teknologi agar inovasi yang dilakukan untuk tujuan instansi dapat lebih efektif dan efisien, tidak gampang hilang serta mudah untuk diperoleh. Tahapan ketiga yaitu penyusunan laporan sesuai dengan format yang telah dibuat oleh seksi perlindungan masyarakat. pada tahapan ini peneliti menerapkan nilai dasar ASN yaitu Akuntabel. Panduan perilaku nilai akuntabel yang peneliti terapkan yaitu melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan panduan perilaku yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Dengan melakukan penyusunan laporan sesuai dengan format dan memiliki pedoman yang dijadikan acuan maka disini kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu penyusunan sesuai format pelaporan baku atau resmi tentunya akan sangat membantu untuk kemajuan Instansi khususnya seksi perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman.

#### **4. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan**

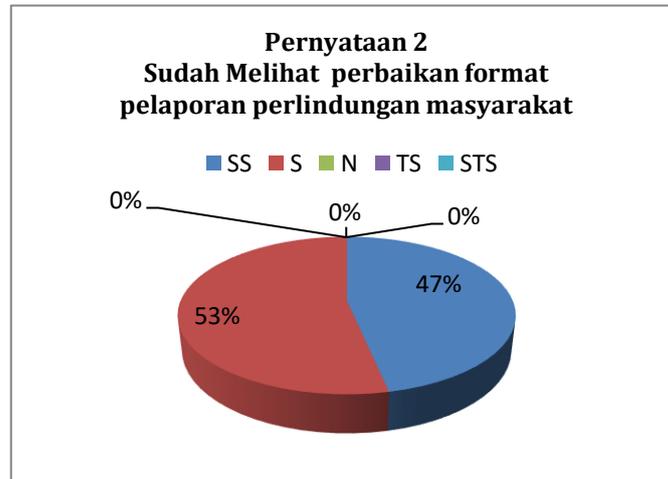
Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah pelaksanaan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan yaitu pembuatan kuesioner untuk melihat manfaat dari format laporan perlindungan masyarakat, penyebaran kuesioner ke responden, penyusunan data

hasil kuesioner. Tahapan pertama yaitu pembuatan kuesioner untuk melihat manfaat dari format laporan perlindungan masyarakat. pada tahapan ini peneliti menerapkan nilai dasar ASN yaitu loyal dengan panduan perilaku yaitu menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi, dan Negara. Dengan melakukan sosialisasi dengan harapan agar para pegawai dapat memperoleh pemahaman dan melakukan perbaikan format pelaporan untuk peningkatan kinerja Instansi menunjukkan sikap dan perilaku yang menjaga nama baik serta citra Instansi, hal tersebut sangat mencerminkan nilai dasar ASN yaitu loyal. Tahapan kedua yaitu penyebaran kuesioner ke responden, penyebaran kuesioner pada tahapan ini peneliti melakukannya dengan tujuan menindak lanjuti kegiatan sebelumnya dan berusaha melakukan perbaikan melalu kuesioner untuk mengetahui pendapat apa saja yang cenderung menjadi pilihan dan terbaik bagi responden. Dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan panduan perilaku perbaikan tiada henti, maka diharapkan menjadi salah satu hal positif penunjang demi kemajuan Instansi dimasa yang akan datang. Tahapan ketiga yaitu penyusunan data hasil kuesioner. Dimana dalam tahapan penyusunan data hasil kuesioner ini, peneliti berusaha untuk menyelesaikannya sebaik mungkin secara komprehensif dan tuntas. Selain itu, nilai dasar ASN yang juga diterapkan yaitu Akuntabel. Panduan perilaku nilai Akuntabel yang peneliti terapkan yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Dalam tahapan ini peneliti berusaha berkomitmen untuk menyelesaikan tahapan kegiatan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga penyusunan data hasil kuesioner ini dapat terselesaikan dan dapat memahami informasi, mencari tahu dan menarik kesimpulan dari jawaban responden dari kuesioner yang dibagikan. Selanjutnya untuk penyusunan data hasil kuesioner, jawaban dari responden yang berjumlah 15 orang akan dianalisis dan diperoleh hasil sesuai diagram dibawah ini.



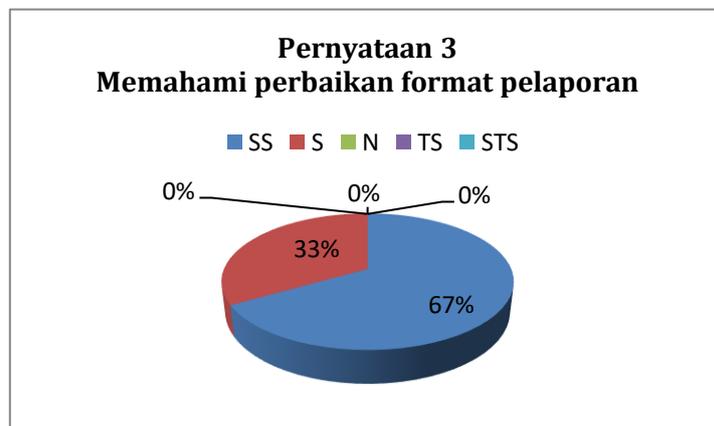
**Diagram 1. Kesesuaian Format Laporan**

Pada pernyataan 1 yaitu peneliti menyetujui format pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman mengikuti pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2010, sebanyak 80% memilih jawaban sangat setuju dan 20% sisanya responden menjawab setuju.



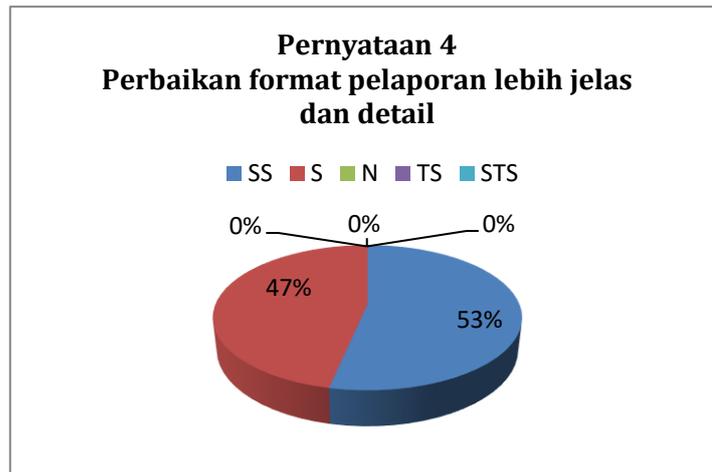
**Diagram 2. Perbaikan Format**

Pada pernyataan 2 yaitu Peneliti sudah melihat format perbaikan pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai yang terbaru, sebanyak 53% memilih jawaban setuju dan 47% sisanya responden menjawab sangat setuju.



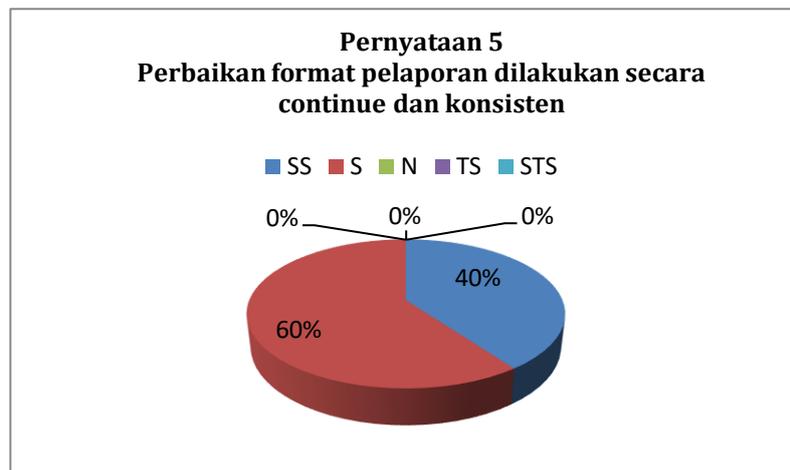
**Diagram 3. Pemahaman Format**

Pada pernyataan 3 yaitu peneliti mudah memahami format perbaikan pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman, sebanyak 67% memilih jawaban sangat setuju dan 33% sisanya responden menjawab setuju.



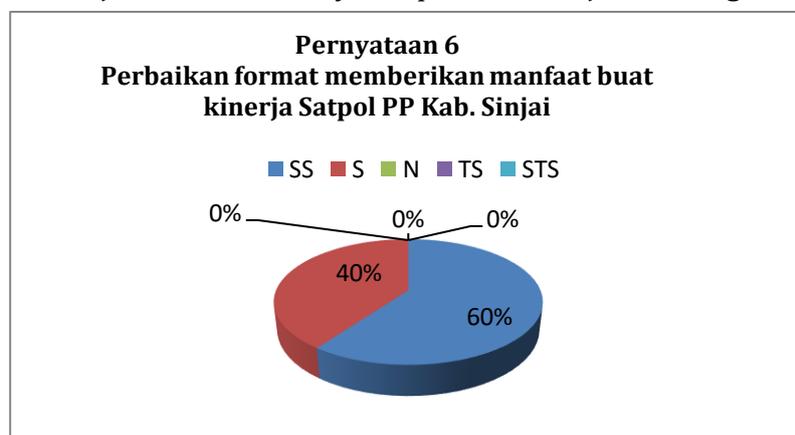
**Diagram 4. Perbaikan Format**

Pada pernyataan ini dengan perbaikan format pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman maka informasi menjadi lebih jelas dan detail, sebanyak 53% menjawab sangat setuju dan 47% sisanya responden menjawab setuju.



**Diagram 5. Pelaporan Format Secara Continue dan Konsisten**

Pada pernyataan 5 yaitu perbaikan format pelaporan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara continue dan konsisten, sebanyak 60% memilih jawaban setuju dan 40% sisanya responden menjawab sangat setuju.



**Diagram 6. Manfaat Format**

Pada pernyataan 6 yaitu perbaikan format pelaporan memberikan manfaat buat kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, sebanyak 60% memilih jawaban sangat setuju dan 40% sisanya responden menjawab setuju.

## **Diskusi**

Untuk melaksanakan gagasan kreatif dalam menyelesaikan isu kendala belum optimalnya pelaporan hasil kegiatan data perlindungan masyarakat, maka ada 4 kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis diantaranya:

### **1. Pelaksanaan pengkajian format laporan perlindungan masyarakat**

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pelaksanaan pengkajian format laporan perlindungan masyarakat. Tahapan kegiatan dimulai dengan tahapan pertama yaitu pengumpulan materi format laporan untuk memperoleh informasi mengenai Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Kementerian dalam Negeri sehingga lebih memahami format baku atau resmi pelaporan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tahapan kedua pembuatan lembar format laporan perlindungan masyarakat dalam tahapan ini terlebih dahulu peneliti berdiskusi mengenai draft format laporan perlindungan masyarakat dengan sesama staf seksi perlindungan masyarakat setelah itu membuat lembar format laporan perlindungan masyarakat. Tahapan terakhir atau ketiga pada kegiatan ini yaitu validasi format laporan oleh seksi perlindungan masyarakat. Dalam tahapan ini peneliti mendiskusikan hasil pembuatan lembar format laporan perlindungan masyarakat oleh mentor selaku Kepala seksi perlindungan masyarakat dan menetapkan format laporan perlindungan masyarakat yang terpadu yang akan digunakan.

### **2. Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur)**

Kegiatan kedua yang dilakukan yaitu pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur). Tahapan ini dimulai dengan tahapan pertama yaitu Pembuatan susunan kerja oleh seksi perlindungan masyarakat. Pada tahapan ini peneliti melakukan diskusi dengan sesama staf seksi perlindungan masyarakat terkait mengenai susunan kerja SOP (Standar Operasional Prosedur) yang akan peneliti buat. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kedua telah dilakukan perencanaan alur proses. Dalam tahapan kedua ini, peneliti berdiskusi dan melakukan konsultasi dengan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang juga selaku mentor mengenai perencanaan alur proses SOP (Standar Operasional Prosedur) Seksi perlindungan masyarakat. Tahapan ketiga yaitu persetujuan oleh Kepala

Dinas. Dalam tahapan ini SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibuat akan ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku pimpinan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebagai bentuk persetujuan atas SOP seksi perlindungan masyarakat.

### **3. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi kepada aparat**

Kegiatan ketiga yaitu Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi kepada aparat. Pada tahapan pertama dimulai dengan persiapan pelaksanaan sosialisasi dan simulasi. Pada tahapan ini peneliti membuat undangan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan sosialisasi dan simulasi, hingga dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Tahapan kedua yaitu pendistribusian format laporan. Dalam tahapan ini walaupun telah dibagikan beberapa lembar format laporan saat sosialisasi dan simulasi tetapi peneliti kembali mengirimkan kembali di grup WhatsApp Kecamatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai format pelaporan perlindungan masyarakat beserta link laporan yang bisa di download. Tahapan terakhir dalam kegiatan ketiga ini yaitu penyusunan laporan sesuai dengan format yang telah dibuat oleh seksi perlindungan masyarakat. Dalam tahapan ini laporan yang diterima diinput sesuai dengan format yang telah dibuat dan disosialisasikan.

### **4. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan**

Kegiatan keempat atau yang terakhir dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan. Tahapan pertama pada kegiatan ini yaitu pembuatan kuesioner untuk melihat manfaat dari format laporan perlindungan masyarakat. Pada tahapan ini pembuatan kuesioner bertujuan untuk melihat apakah sosialisasi yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dengan sasaran bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman. Tahapan kedua yaitu penyebaran kuesioner ke respond. Pada tahap ini telah ditentukan siapa saja yang akan menjadi responden untuk dibagikan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Tahapan ketiga yaitu penyusunan data hasil kuesioner. Dalam tahapan ini kuesioner yang telah dibagikan akan di olah agar dapat menyimpulkan suatu hasil dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan maka untuk mengatasi kendala belum optimalnya pelaporan hasil kegiatan data perlindungan masyarakat maka

diperlukan gagasan yaitu perbaikan format pelaporan untuk peningkatan kinerja perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Dari hasil analisis jawaban responden ditemukan bahwa responden menyetujui perbaikan format pelaporan mengikuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2010, responden memahami format perbaikan pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman, responden merasa informasi menjadi lebih jelas dan detail dengan adanya perbaikan format pelaporan, responden merasa perbaikan format pelaporan harusnya dilakukan secara continue dan konsisten, serta perbaikan format pelaporan memberikan manfaat buat kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai.

Dalam upaya perbaikan format pelaporan seksi perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan acuan yang ada yaitu Permendagri Nomor 27 Tahun 2010. Tentunya hal ini diupayakan tetap dengan dukungan berbagai pihak diruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ataupun berbagai pihak terkait utamanya di posko-posko kecamatan dimana Satuan Polisi Pamong Praja bekerja agar hal ini melalui informasi yang lebih detail dan jelas demi kinerja Instansi kedepannya dan juga demi tercapainya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

## REFERENSI

- Astuti, R. Y., Sa'adah, N., Rahmawati, S. D., Astuti, J. P., Suprapti, S., Sudargini, Y., & Khasanah, N. E. (2020). impact of leadership style, work motivation, organization culture toward Satuan Polisi Pamong Praja work performance. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 49-64.
- Bima, B., Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 134-142.
- Gunawan. (2015). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 4, 347 – 360.
- Handayani, Sri. 2020. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bantul Dalam Rangka Penegakan Perda. *Jurnal Riset Manajemen*, Volume 7 Nomor 1,46-57.
- Hasrul, M. (2017). Eksistensi satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. *Amanna Gappa*, 60-69.

- Kinasih, Wulan & Pramono, Joko. 2018. Optimalisasi Peran Satlinmas Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Volume 3 Nomor 2, 25-32.
- Murtiningsih, E. (2012). Pengaruh Motivasi, Kesejahteraan dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi*, 1(3), 81-93.
- Suhendi, Dedy. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35-47.
- Sutrisno, S., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor satuan polisi pamong praja kota Semarang. *Journal of Management*, 2(2).
- Yulia, Y., Rachmawati, I., & Mulyadi, A. (2019). Kinerja Satpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 19-29.